



REVISI RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) TAHUN 2017 - 2022

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO**



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. P. Kalengkongan No. 3 Kelurahan Tenda Kota Gorontalo – 96117
(0435) 821236, Faximile (0435) 821236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 07 /DLHK/SK/I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK)
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017-2022

KEPALA DLHK PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DLHK Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah di revisi menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR);
19. Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.

22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo; dan
23. Surat Edaran Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 07 Januari 2019



BAMBANG TRIHANDOKO, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750823 199903 1 004

Tembusan :

1. Kepada Yth. Gubernur Gorontalo, sebagai laporan;
2. Kepada Yth. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Kepada Yth. Pj, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Kepada Yth. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
5. Arsip.

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Gorontalo**
Nomor : 07 /DLHK/SK/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
**Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Gorontalo Tahun 2017-2022**

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK)
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017-2022**

Jabatan dalam Tim

Nama/Jabatan

Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
Ketua	:	Sekretaris DLHK Provinsi Gorontalo
Anggota	:	1. Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 2. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi 3. Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem 4. Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian 5. Kepala KPH I s.d VII 6. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian 8. Kasubag Keuangan

Kepala Dinas,


**BAMBANG TRIHANDOKO, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750823 199903 1 004**



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. P. Kalengkongan No. 3 Kelurahan Tenda Kota Gorontalo – 96117
(0435) 821236, Faximile (0435) 821236

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 10 /DLHK/SK/I / TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017-2022

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) serta Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
- b. bahwa perlu merevisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang mengacu pada aturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan merubah dan menambah kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah di revisi menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR);
19. Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.
22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo; dan
23. Surat Edaran Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menyatakan bahwa tambahan kegiatan dalam rumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017-2022 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis
- KEDUA** : Butir-butir tambahan kegiatan pada Renstra Dinas yang dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini menjadi pedoman bagi bidang – bidang dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo
pada tanggal : 15 Januari 2019



BAMBANG TRIHANDOKO, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750823 199903 1 004

Tembusan :

1. Kepada Yth. Gubernur Gorontalo, sebagai laporan;
2. Kepada Yth. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Kepada Yth. Pj, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Yth. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
Nomor : 10 /DLHK/SK/I/ TAHUN 2019
Tanggal : 15 Januari 2019
Tentang : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
I	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	
1	Kelola Kawasan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	diganti nomenklatur kegiatan menjadi Keg. "Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial"
2	Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	
3	Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	jumlah penurunan titik api karhutla	diganti menjadi dengan Keg. "Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan"
4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	jumlah penurunan titik api karhutla	
5	Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial - KEE)	Jumlah wilayah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang terbentuk	diganti dengan Keg. "Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)"
6	Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	
7	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH I DAN II - GORONTALO BARAT	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato"
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato	Luas lahan yang direhabilitasi	
9	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH III -POHUWATO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa"
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa	Luas lahan yang direhabilitasi	
11	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH IV - GORONTALO UTARA	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumalata"
12	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumalata	Luas lahan yang direhabilitasi	
13	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH V - BOALEMO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tilamuta"
14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tilamuta	Luas lahan yang direhabilitasi	
15	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VI - GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto"

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
16	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto	Luas lahan yang direhabilitasi	
17	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bone"
18	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bone	Luas lahan yang direhabilitasi	
II	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi	
1	Pengembangan HHBK pada KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat"
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat	
3	Pengembangan HHBK pada KPH III Pohnuato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohnuato	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohnuato"
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohnuato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohnuato	
5	Pengembangan HHBK pada KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara"
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara	
7	Pengembangan HHBK pada KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo"
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo	
9	Pengembangan HHBK pada KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VI - Gorontalo	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo"
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VI - Gorontalo	
11	Pengembangan HHBK pada KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VII - Bone Bolango dan Kota	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VII Bone Bolango dan Kota "
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VII - Bone Bolango dan Kota	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
III	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK FISIK)	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	
1	Hutan Manunggal (DAK FISIK)	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	
2	Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK FISIK)	Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	
4	Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan (DAK FISIK)	Jumlah Fasilitas Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang dibangun	
5	Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (DAK FISIK)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang terfasilitasi dalam pengelolaan kawasan	
6	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
7	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit III Pohuwato (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
8	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
9	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit V Boalemo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
10	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
11	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI I Bone Bolango dan Kota Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
IV	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air dan Udara	
1	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan (Izin lingkungan, PPA, PPU)	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan izin lingkungan, PPA, PPU"
2	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan izin lingkungan, PPA, PPU	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	
3	Pengumpulan dan Penyusunan Data DIKPLHD, IKLH	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)"
4	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
	Lingkungan Hidup (IKLH)		
V	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DAK Fisik)	Indeks Kualitas Air dan Udara	
1	Pemantauan Kualitas Air Secara Online (DAK Fisik)	Jumlah fasilitas pemantauan kualitas air secara online yang tersedia	
VII	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	Persentase Kasus LHK yang Diselesaikan	
1	Operasi Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"
2	Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	
3	Operasi Justice tindak pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyelesaian Tindak Pidana LHK"
4	Penyelesaian Tindak Pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK	


KEPALA DINAS
BAMBANG TRIHANDOKO, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750823 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2018–2022 dapat terselesaikan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Keenam, menjelaskan tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang mencakup beberapa hal sebagaimana pada pasal 110 dan telah tertuang dalam Dokumen Renstra DLHK Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2018–2022 adalah "Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Pemerintah Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode tahun 2018–2022 dan telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra ini, diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Gorontalo, Januari 2019
Kepala Dinas



BAMBANG TRIHANDOKO, SP
NIP 197508231999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan renstra K/L	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Adapun yang melandasi perubahan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur yang merupakan penggabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah dengan Dinas Kehutanan dan Pertambangan;
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR);
- ✓ Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- ✓ Berita acara hasil pembahasan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Penggunaan DBH DR Tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat. Pembahasan dilakukan antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah "Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Pemerintah Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra dimaksud berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan selama kurun waktu tahun 2017-2022. Renstra OPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga mampu menggambarkan penjabaran visi misi kepala daerah sesuai tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya dokumen Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sebagai tolok ukur penilaian terhadap kinerja OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah di revisi menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo; dan
20. Surat Edaran Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan bagi DLHK Provinsi Gorontalo dalam

melaksanakan tugas dan fungsi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017-2022.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain :

1. Merumuskan strategi, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah tahun 2017-2022;
2. Memberikan arah pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
4. Menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hal-hal yang termuat dalam bab ini antara lain Latar belakang penyusunan Renstra, Aturan-aturan hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra, Maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Bab ini menyajikan data dan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dilaksanakan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L serta telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini diuraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggabungan dari BLHRD Provinsi Gorontalo dan Dinas Kehutanan ESDM Provinsi Gorontalo yang diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

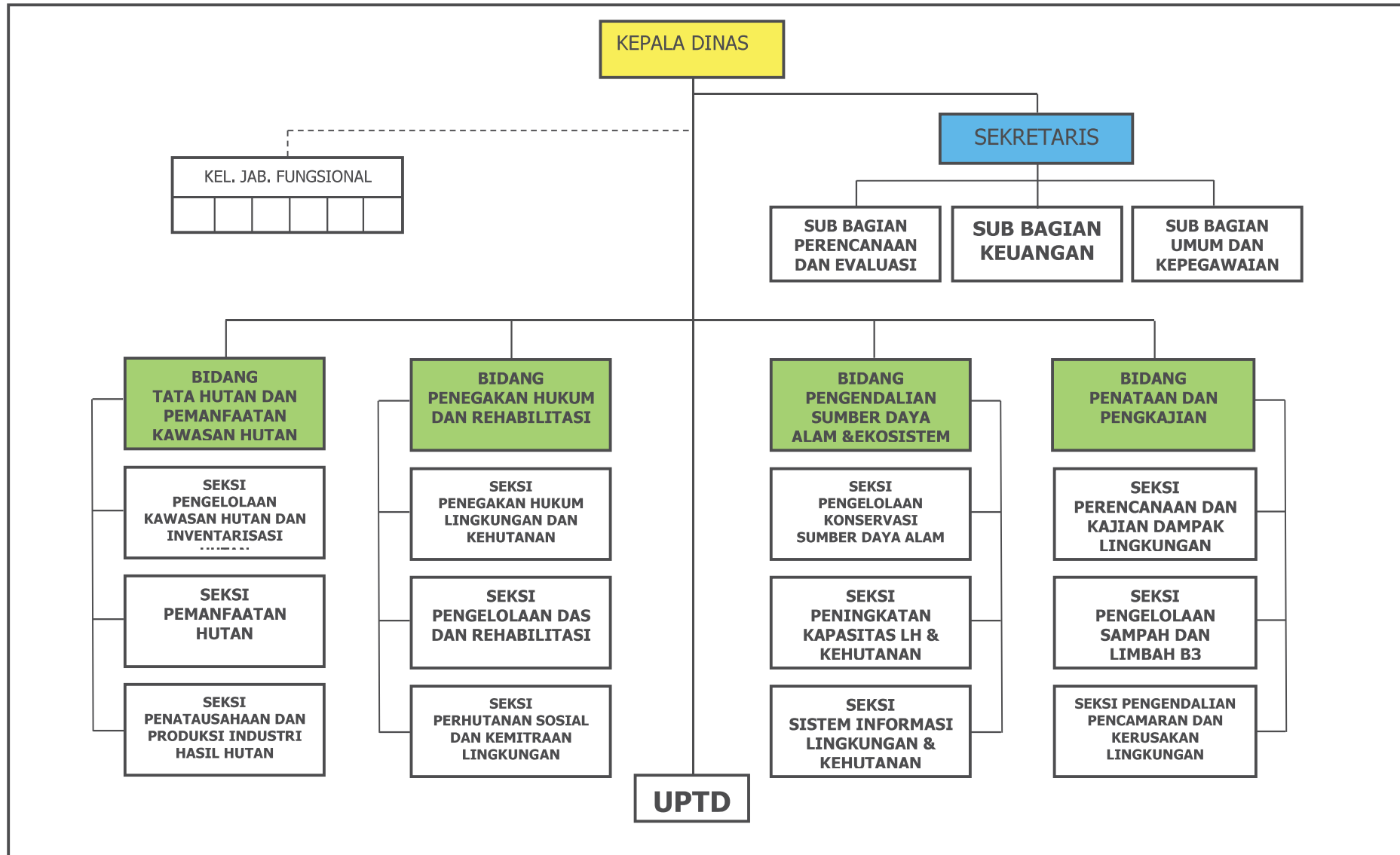
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- d. Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
- e. Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- f. Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo seperti pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2019



Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo, Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 4 (empat) pejabat eselon III (Kepala Bidang), 6 (enam) pejabat eselon III (Kepala UPTD) dan 15 (lima belas) pejabat eselon IV dan 18 (delapan belas) pejabat eselon IV Lingkup UPTD.

Uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, Penegakan Hukum dan Rehabilitasi, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. Menyusun, menyelenggarakan dan melaksanakan evaluasi dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. Menyusun data base, standar, operasional dan prosedur dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. Melakukan pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, penegakan hukum, rehab ilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan; serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. Mengelola barang milik/kekayaan negara dan atau daerah yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b) Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. Pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris dibantu oleh 3 orang eselon 4 (sub bagian) yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - b. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan atau kegiatan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - f. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
 - g. penyiapan rumusan penyusunan produk hukum kehutanan;
 - h. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

- i. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- j. penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- k. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- l. penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- m. penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- n. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- o. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- p. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan;
- b. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
- c. Seksi Penatausahaan dan Produksi Industri Hasil Hutan.

d) Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi;

Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan, pengelolaan DAS serta perhutanan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan panduan dan prosedur serta instruksi kerja Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta perhutanan sosial;
- b. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta perhutanan sosial;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta Perhutanan Sosial;
- d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan atau kegiatan Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta Perhutanan Sosial;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta Perhutanan Sosial;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- g. pelaksanaan pengamanan hutan dan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan TSL yang tidak dilindungi;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah penyangga KSA, KPA di wilayah provinsi;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan DAS, pembentukan forum pengelolaan DAS dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknis konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic hutan, sertifikasi benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, penembangan kemitraan kehutanan dalam wilayah provinsi;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi; Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan dalam provinsi.
- p. penyiapan rumusan penyusunan produk hukum kehutanan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi terdiri dari:

- a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
- b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi; dan
- c. Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

e) Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan program/kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan diseksi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana Program/kegiatan Pengelolaan Konservasi SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program/kegiatan Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan;
- b. melaksanakan, memantau dan koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program/kegiatan Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan;
- c. menyusun rencana Program/kegiatan Pengelolaan Konservasi SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program/kegiatan Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan;
- d. membina, mengawasi dan mengevaluasi seksi dibawahnya dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan ekosistem terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. Seksi Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan.

f) Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan;

Bidang Penataan dan pengkajian lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan program/kegiatan, perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana Program/kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan, memantau dan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menyusun rencana Program/kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan Bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
- c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas-Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD-KPH) merupakan satuan perangkat daerah yang melaksanakan operasional pengelolaan hutan dan perlindungan hutan diwilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. UPTD-KPH mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yaitu:

1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Dinas-Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD-KPH) mempunyai tugas melaksanakan operasional pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan diwilayah tapak berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas UPTD-KPH menyelenggarakan fungsi:

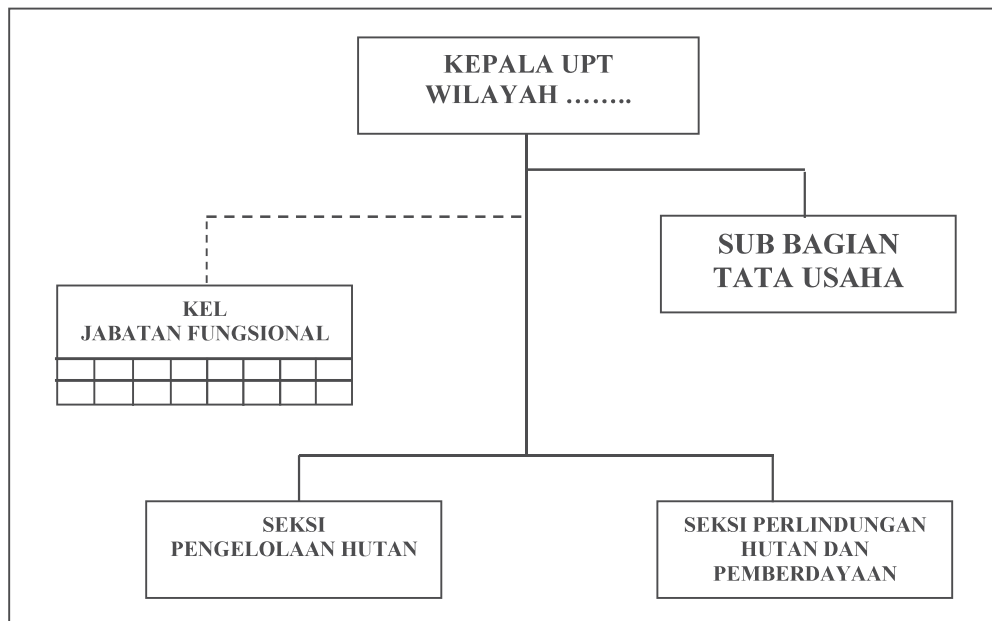
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan kelembagaan dan suberdaya masusia dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan rumah tangga, keuangan dan perencanaan UPTD-KPH.

4. Organisasi

- 1) UPTD-KPH diprovinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan hutan kelas A dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a. UPTD-KPH Wilayah I dan wilayah II Gorontalo Barat dengan luas wilayah 143.943 Ha;
 - b. UPTD-KPH Wilayah III Pohuwato dengan luas wilayah 116.275 Ha;
 - c. UPTD-KPH Wilayah IV Gorontalo Utara dengan luas wilayah 105.808 Ha;
 - d. UPTD-KPH Wilayah V Boalemo dengan luas wilayah 96.926 Ha;
 - e. UPTD-KPH Wilayah VI Gorontalo dengan luas wilayah 84.949 Ha
 - f. UPTD-KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 33.599 Ha.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPTD-KPH



3) Tata Kerja

a. Kepala UPTD-KPH

- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD-KPH bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Kepala UPTD-KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi terkait di unit wilayah kerjanya.
- Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD-KPH menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
 - b) Menyusun program dan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;
 - c) Menyelenggarakan pembinaan/pelayanan dan kebijakan teknis pada kesatuan pengelolaan hutan;
 - d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada kesatuan pengelolaan hutan;
 - e) Melakukan kerjasama dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
 - f) Menyelenggarakan pengawasan pada kesatuan pengelolaan hutan;
 - g) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;

- h) Menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- i) Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala UPTD dibantu oleh tiga subbag yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan Hutan
3. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah 106 orang, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Gorontalo

NO	PNS GOLONGAN	JUMLAH	SATUAN
1	GOLONGAN IV	14	Orang
2	GOLONGAN III	72	Orang
3	GOLONGAN II	18	Orang
4	GOLONGAN I	2	Orang
JUMLAH		106	Orang

2. Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo berjumlah 106 orang, sebagaimana diuraikan dalam table berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	SATUAN
1	Pendidikan Doktor (S3)	3	Orang
2	Pendidikan Magister (S2)	14	Orang
3	Pendidikan Sarjana (S1)	55	Orang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	SATUAN
4	Pendidikan Diploma (D3)	1	Orang
5	Pendidikan SMA Sederajat (Non Sarjana)	33	Orang
	JUMLAH	106	orang

3. Sebaran jumlah Pegawai Negeri Sipil di masing-masing UPTD KPH se-Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

NO	UPTD KPH	JUMLAH	SATUAN
1	KPH Unit I dan II Gorontalo Barat	14	Orang
2	KPH Unit III Pohuwato	17	Orang
3	KPH Unit IV Gorontalo Utara	31	Orang
4	KPH Unit V Boalemo	43	Orang
5	KPH Unit VI Gorontalo	35	Orang
6	KPH Unit VIII Bonbol dan Kota	53	Orang

b. Sarana dan Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki DLHK dalam menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Alat-alat angkutan

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBELIAN
1	Motor	Yamaha/Mio Soul	2009
2	Motor	Suzuki/Shogun FL 125	2010
3	Motor	Kawasaki Trail LX 150	2010
4	Motor	Honda/Neo Beat CBS	2014
5	Motor	Honda Vario/110 F1	2015
6	Motor	Kawasaki/KLX 150 BF	2016
7	Mobile Workshop	Innova Luxury	2012
8	Mobil Pick Up	Toyota/Hilux Pick Up Single Cabin	2013

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel Mesin dan Peralatan Studio dan Komunikasi

No.	Jenis/Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Type Barang	Tahun
1	Televisi	Panasonic Ts2088af	2002
2	Televisi	Panasonic 5188 sf 21 inch	2003
3			
4	Tape Recorder	Panasonic	2005
5	Televisi	Samsung	2008
6	Pesawat Telephone	Panasonic/Faximili all in one hp officejet 6310	2009
7	Digital Audio Tape Recorder		2010
8	Handy Talky	Alinco	2010
9	Lensa Camera		2011
10	Faximile	Panasonic	2012
11	Telephone	Panasonic	2012
12	Camera Digital	Nikon/ D 3200	2013
13	Televisi	Toshiba/LED	2013
14	Televisi	Panasonic/TH32A402G	2014
15	Camare Digital	Nikon/D3100	2014
16	Handy Cam	Sony / HDRPJ230E	2014
17	Faximile	Panasonic/kxcp701cx	2014
18	Camere Digital	Nikon D5200	2015
19	Televisi	32 Inch	2016

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
1	Lemari Kayu	Lemari arsip	2001
2	Meja Telpon	-	2001
3	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	-	2001
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kony KY30T	2001
5	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi pimpinan kony	2001
6	Lemari kayu	Lemari arsip / 3 pintu	2002
7	Lemari kayu	Lemari arsip	2002
8	Lemari kayu	Lemari arsip	2002
9	Lemari kayu	Lemari arsip	2002
10	Papan Pengumuman	-	2002
11	Kursi Tamu	-	2002
12	Alat Pemd	Yamato	2002

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
	Kebakaran Lain-lain		
13	Alat Pemd Kebakaran Lain-lain	Tabung pemadam kebakaran	2002
14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 biro	2002
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 biro	2002
16	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2002
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2002
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2002
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2002
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2002
21	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2002
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2002
23	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	2002
24	Kompas	Brunton 8700	2002
25	Geological Hamaer	Geological hammer / Estwing E3	2002
26	Filling Besi/Metal	Filling Kabinet / Brother	2003
27	AC Split	Ac split Toshiba / G lock	2003
28	Alat Pemd Kebakaran Lain-lain	Chubb	2003
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	½ Biro	2003
30	Meja Biro	1 ½	2003
31	Meja Biro	-	2003
32	Meja Biro	-	2003
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Hidrolik ergotec	2003
34	Buffet Kayu	Agatis / 4 Pintu	2003
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 biro	2004
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	½ biro	2004
37	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2004
38	Kursi Pejabat Lain-lain	-	2004
39	Proyektor + Attachment	Panasonic / LCD	2004

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
40	Peta	Skala 1:250000	2004
41	Lemari kayu	-	2004
42	Sofa	-	2004
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	2004
44	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	GPS Garmin 12 x L	2005
45	Lemari Kayu	-	2005
46	Meja Biro	-	2005
47	AC Unit	LG	2005
48	AC Unit	LG	2005
49	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	2005
50	Lemari kayu	Lemari arsip	2006
51	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	-	2006
52	Unit Ekstraksi	-	2006
53	Unit Ekstraksi	-	2006
54	Unit Ekstraksi	-	2006
55	Bran Kas	-	2006
56	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olivetty	2007
57	Filling Besi/Metal	Filling Kabinet / Brother	2007
58	Lemari kayu	Lemari arsip / lemari besar	2007
59	Lemari kayu	-	2007
60	Papan Tulis	Panasonic	2007
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2007
62	Kursi kerja pegawai Non Struktural	-	2007
63	Lemari Baja pengering	-	2008
64	AC Split	Ac split / sharp	2008
65	P.C Unit	Acer	2008
66	Laptop	Axioo centaure S2-578	2008
67	Printer	Hp laser jet D1360	2008
68	Meja kerja Pejabat Lain-lain	-	2008
69	Jeep	Nissan / X-Trail	2008
70	Lemari kayu	-	2008
71	Lemari kayu	-	2008
72	Meja Biro	-	2008
73	AC Unit	Panasonic	2008
74	Computer Compatible	Intel core 2 duo 2,4 Ghz	2008
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Prolink putar	2008

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
76	Crawler Tractor	-	2009
77	Sepeda Motor	Yamaha / Mio Soul	2009
78	Laptop	Acer Aspire 4920	2009
79	Laptop	Toshiba	2009
80	Proyektor + Attachment	Panasonic / LCD	2009
81	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	Optional GDI Printer Function / SCENER	2009
82	AC Unit	Panasonic	2009
83	Gorden	Vertival blinds	2009
84	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Batu marmer	2009
85	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Meja kerja direksi sailend	2009
86	Kursi Kerja pejabat Eselon IV	-	2009
89	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Olimpic	2009
90	AC Split	ac split / LG jet cool	2010
91	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	KAYU	2010
92	Alat Laboratorium Fisika Lain-lain	Geologi/Geodesi	2010
93	AC Unit	Panasonic	2010
94	AC Unit	LG	2010
95	AC Unit	Panasonic	2010
96	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Olimpic	2010
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010
98	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010
99	Meja Operator	-	2010
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Hidrolic	2010
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Olimpic	2010
102	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	2010
103	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Gantung	2010
104	Alat Lab. Kimia Lain-lain	Germany vario ph set	2010
105	Termometer standard	-	2011

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
106	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	-	2011
107	Note Book	-	2011
108	Note Book	Toshiba	2011
109	Kursi Rapat	Guandra	2011
110	AC Unit	Panasonic	2011
111	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2011
112	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Garmin	2012
113	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	GPS Garmin	2012
114	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	-	2012
115	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2012
116	Mesin Absensi	Schik	2012
117	Meja Rapat	-	2012
118	Meja Tambahan	½ Biro	2012
119	Kursi Rapat	-	2012
120	Kursi Rapat	Frontline (merah)	2012
121	Kursi Rapat	-	2012
122	Kursi Rapat	Frontline (merah)	2012
123	Kursi Rapat	-	2012
124	Kursi Rapat	Frontline (merah)	2012
125	Kursi Rapat	-	2012
126	Kursi Putar	-	2012
127	Kursi Putar	Frontline (biru)	2012
128	Kursi Putar	-	2012
129	AC Unit	-	2012
130	AC Unit	Sharp / AH-AP9MSY	2012
131	AC Unit	Sharp / AH-AP9MSY	2012
132	Sound System	Russel	2012
133	P.C Unit	HP / IntelCore i5-2400	2012
134	P.C Unit	HP / IntelCore i5-2400	2012
135	P.C Unit	Dell	2012
136	Note Book	Asus / U36SD-RX223 Black	2012
137	Note Book	Asus / A43SA-FX071D	2012
138	Note Book	Asus / A43SA-VX071D	2012
139	Printer	Canon Pixma MG5270	2012
140	Printer	Canon / Pixma MG5270	2012
141	Printer	Canon / Pixma iX6560	2012
142	Printer	Canon / Pixma MG5270	2012
143	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Toshiba / V63600-A5006B	2012

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
144	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Biro	2012
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2012
146	Proyektor + Attachment	Hitachi / CP-X5021N	2012
147	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Garmin Oregon / 550	2012
148	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Hanna / HI 98107	2012
149	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Lutron / CD-4302	2012
150	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution x-102c	2012
151	Mesin Absensi	-	2012
152	Display	HITACHI / CP-X3021WNEF	2012
153	Kursi Rapat	-	2012
154	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Kayu Kls I	2012
155	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Kayu Kls II	2012
156	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2012
157	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Fronline	2012
158	Thermometer Digital	Infrared DT 8380	2012
159	Perkakas Khusus Lain-lain	-	2013
160	Global Positioning System	Garmin / 78s	2013
161	Alat ukur Lainnya (Lain-lain)	Garmin / 78Si	2013
162	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2013
163	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2013
164	Rak Kayu	2 Pintu Kaca	2013
165	AC Unit	LG / SN09LTG	2013
166	P.C Unit	Hewlett Packard / P2-1350L	2013
167	P.C Unit	Lenovo All in One / M1782	2013
168	P.C Unit	Asus / All in One ET2013	2013
169	Laptop	Toshiba / Satellite C840D-1019	2013
170	Laptop	Toshiba / Satellite L735-1038UB/39UR	2013
171	Laptop	Toshiba / Satellite L735-1038UB/39UR	2013

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
172	Note Book	Sony Vaio / Duo II	2013
173	Note Book	Acer / Aspire V3-471G-53234G75	2013
174	Note Book	Asus / Asus A46CM - i7	2013
175	Note Book	Toshiba	2013
176	Note Book	Asus X4C5	2013
177	Printer	Canon A3 / Pixma IX 6560	2013
178	Printer	Canon / Pixma MG3170	2013
179	Plotter	HP / Designjet1300	2013
184	Printer	Canon Pixma / E500	2013
185	Printer	Canon Pixma / E500	2013
186	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Informa / Informa Executive Table HS-1808	2013
187	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Informa / Informa Uzmanov Director Chair X0844689	2013
188	Proyektor + Attachment	Epson / Epson EB-X14	2013
189	Proyektor + Attachment	Epson / EB-S9	2013
190	Ampere Meter	Sanwa / DCM400	2013
191	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Brother / Standar	2013
192	Display	Hitachi / high resolution	2013
193	AC Unit	SHRAP / 1	2013
194	Microphone	Beringer / Standar	2013
195	Note Book	Toshiba / Windows 7	2013
196	Note Book	Toshiba / Windows 7	2013
197	Note Book	acer / V5	2013
198	Printer	canoan / Infus	2013
199	Printer	epson / L 100	2013
200	Computer Compatible	Axioo Mimo P 625 / Mimo P 625	2013
201	Water Sample	INSCIEN PRO / FIBER	2013
202	Note Book	Toshiba / Windows 7	2013
203	Mesin Proses Lain-lain	-	2014
204	Global Positioning System	Garmin / 62s	2014
205	Mesin Ketik Elektronik	Brother / GX-6750	2014
206	Mesin Absensi	Finger Print / Reader Solution X	2014
207	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	TOA / ZA-2060	2014
208	Meja Reseption	-	2014
209	Kursi Tamu	4 unit Kursi dan 1 unit	2014

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
		Meja	
210	Kursi Tamu	2 unit Kursi dan 1 unit Meja	2014
211	Meja Biro	1 Biro	2014
212	AC Unit	LG / 709NL	2014
213	P.C Unit	Asus / BP6335	2014
214	Note Book	Acer / E1470G-33214G50	2014
215	Note Book	Toshiba / M840-1071	2014
216	Printer	Hewlett Packard / Laserjet P1102	2014
221	Printer	canon / pixma E510 3 in 1	2014
222	External	Asus / XHDD1TB USB3.0	2014
223	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Ergotec	2014
224	Alat Laboratorium Lain-lain	STENLIS	2014
225	Overhead Projektor	EPSON / EB-S100/X100	2014
226	Sofa	SOFA SUDUT MODEL L / SOFA SUDUT MODEL L	2014
227	AC Unit	AKARI / 1 PK	2014
228	Note Book	TOSHIBA / TOSHIBA	2014
229	Note Book	ACER / ACER	2014
230	Hard Disk	SEAGATE / 1 TERA	2014
231	Printer	CANON / PRINTER CANON LASER DAN CANON PIXMA	2014
232	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	CHITOSE / LIPAT	2014
233	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	OLYMPIC / LHS016381	2014
234	Alat Uji Gas Buang	-	2014
235	Gas Detector	-	2014
236	Scanner	-	2015
237	AC Unit	LG / 5 PK TPNC488TLA4	2015
238	AC Unit	POLYTRON / 3 PK PSF 3001	2015
239	AC Unit	Panasonic / 1 PK	2015
240	P.C Unit	LENOVO / C365-0405	2015
241	P.C Unit	All In One Lenovo / C20-30- F0B200031D	2015
242	Note Book	ASUS / A451LN-WX028D	2015
243	Note Book	ACER / ASPIRE E5-417-355	2015
244	Note Book	ACER / V3-371-51TL	2015
245	Printer	HP LASERJET / P1002	2015
246	Printer	HP LASERJET / P1025	2015

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
247	Printer	Epson / L220	2015
248	Printer	Epson / L120	2015
249	Eksternal	Toshiba / 500GB+Go+	2015
250	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Lokal / Kayu	2015
251	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Alfero	2015
252	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	Frontline	2015
253	Proyektor + Attachment	Panasonic	2015
254	Station Wagon (SUV, MPV)	Toyota Innova V Luxury / Toyota Innova V Luxury	2015
255	Meja Rapat	Meja Rapat kayu panjang / Meja Rapat kayu panjang	2015
256	Meja Rapat	meja rapat kayu / meja rapat kayu sudut	2015
257	Kursi Rapat	Frontline Kursi Rapat Susun Stenless / Frontline Kursi Rapat Susun Stenless	2015
258	AC Unit	PANASONIC 1 PK / PANASONIC 1 PK	2015
259	Sound System	sound sistem portable ADC 318 / sound sistem portable ADC 318	2015
260	Alat Rumah Tangga Lain-lain	sarung meja rapat orange / sarung meja rapat orange	2015
261	Alat Rumah Tangga Lain-lain	sarung kursi / sarung kursi	2015
262	Note Book	Asus X 453 MA-BING / Asus X 453 MA-BING	2015
263	Kursi Rapat	ALVERO / AH-002-SP-FYNIL	2016
264	Laptop	LENOVO / IP510S-141SK	2016
265	Note Book	Acer / E15 E5-551-TG1A Black	2016
266	Printer	Epson L120 - Infus	2016
267	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	2016
268	Kursi Kerja Eselon IV	-	2016
273	Meja Kerja	-	2016
274	Belanja Modal Pengadaan Gordyn	-	2016
275	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Teralis Jendela	-	2016
276	Belanja Modal Pengadaan LCD	(1 set), LAYar, Tripot	2016

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
277	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem Ruang AULA	-	2016
278	Belanja Modal Pengadaan Ac Split 1 PK, 3 Unit		2016
279	Pengadaan AC Standing 3 PK, 2 Unit		2016
280	Printer	EPSON L220, 2 Unit	2016
281	Komputer	Lenovo 2 Unit	2016
282	Pengadaan Laptop Acer		2016
283	Meja Biro		2016
284	Kursi Direksi		2016
285	Pengadaan meja ½ Biro		2016
286	Pengadaan meja ½ Biro		2016
291	Pengadaan meja ½ Biro		2016
292	Pengadaan AC 1 PK		2016
293	Pengadaan AC 2 PK		2016
294	Pengadaan RAK Arsip Besi		2016
295	Pengadaan Filling Kabinet		2016
296	Pembangunan Gedung Logistik		2016
297	Tambah Daya Listrik		2016

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pembahasan Kinerja Pelayanan SKPD diuraikan secara terpisah untuk Dinas Kehutanan dan BLHRD

-Dinas Kehutanan dan ESDM

Sasaran pada Renstra periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Penataan Fungsi Hutan sesuai peruntukannya.
- Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- Perlindungan kawasan hutan produksi, hutan lindung terhadap pencurian, peredaran & perdagangan kayu (*illegal logging* dan *illegal mining*) dan perambahan hutan serta kebakaran hutan dan lahan.
- Terwujudnya peningkatan produktivitas hasil hutan melalui pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan

- Peningkatan partisipasi/pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan.
 - Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
 - Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan bidang kehutanan, pertambangan dan energi.
 - Terlaksananya pembinaan & pengawasan usaha pertambangan.
 - Terlaksananya pengawasan distribusi dan HET BBM dan BBM bersubsidi di 6 kabupaten/kota.
 - Terlaksananya dukungan pemerintah daerah terhadap program penghapusan subsidi BBM dan Konversi Mitan ke Elpiji di 2 kabupaten.
 - Eksplorasi sumberdaya mineral.
 - Penyediaan data EBT.
 - Peningkatan Kualitas Aparatur Kehutanan & Pertambangan.
- **Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD)**

Sasaran pada Renstra periode sebelumnya adalah :

- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.
- Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.
- Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3.
- Meningkatnya indeks kualitas lingkungan.
- Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai.
- Meningkatnya upaya pengelolaan limbah oleh kegiatan PETI.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir dan laut.
- Meningkatnya kapasitas masyarakat di wilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan.
- Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup.
- Meningkatnya kualitas air sungai.
- Meningkatnya kualitas air Danau Limboto.
- Meningkatnya kualitas air laut di wilayah Teluk Tomini dan laut Sulawesi.
- Meningkatnya status mutu udara.
- Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri.

- Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.
- Meningkatnya sekolah yang berbudaya lingkungan.
- Meningkatnya kualitas penilaian AMDAL di Provinsi Gorontalo.
- Meningkatnya kualitas penilaian dan penyusunan AMDAL di Provinsi Gorontalo.
- Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- Meningkatnya kualitas riset dan diseminasi untuk menunjang percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
- Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam melakukan penelitian.
- Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Gorontalo.
- Meningkatnya kerjasama penelitian dengan lembaga terkait.
- Meningkatnya peran DRD dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan pembangunan kepada pemerintah Meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM berbasis Teknologi tepat guna.
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan kelautan dan ekonomi kerakyatan.

Pemaparan lebih lanjut mengenai tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut:

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Cpaian Pada Tahun Ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Lingkungan Hidup																			
1	Peningkatan indeks kualitas lingkungan	-	-	-	70	78	81	84	86	0	75.74	98.73	72.09	67.86	100	97.10	122	85.82	78.91
2	Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (327 perusahaan)	-	-	-	0 usaha/ kegiatan	18 usaha/ kegiatan	20 usaha/ kegiatan	22 usaha/ kegiatan	24 usaha/ kegiatan	0 usaha/ kegiatan	18 usaha/ kegiatan	21 usaha/ kegiatan	22 usaha/ kegiatan	24 usaha/ kegiatan	0	100	105	100	100
3	Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Gorontalo	-	-	-	20 orang aparatur/ 200 orang masyarakat	20 orang aparatur/ 200 orang masyarakat	30 orang aparatur/300 orang masyarakat	30 orang aparatur/300 orang masyarakat	30 orang aparatur/ 350 orang masyarakat	20 orang aparatur/ 200 orang masyarakat	20 orang aparatur/ 200 orang masyarakat	30 orang aparatur/300 orang masyarakat	30 orang aparatur/2000 orang masyarakat	30 orang aparatur/ 0 orang masyarakat	100	100	100	100	100
Urusan Kehutanan																			
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	-	-	-	15,000	15,350	15,750	16,200	16,700	13,100	13,450	13,800	14,200	n/a	87.33	87.62	87.62	87.65	n/a
2	Kerusakaan Kawasan Hutan (Ha)	-	-	-	228,116	212,766	197,016	180,816	164,116	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Produksi Hasil Hutan	-	-	-	21,607	21,949	22,290	22,632	22,974	6,108	27,637	25,600	29,667	n/a	28.27	126	114.85	131	n/a
	a. Kayu Bulat (m3)	-	-	-	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	5,029	60,765	57,750	62,500	n/a	8.98	107	99.57	106	n/a
	b. Kayu Gergajian (m3)	-	-	-	2,621	2,646	2,671	2,696	2,721	1,959	21,268	17,850	25,000	n/a	74.72	804	668	927	n/a
	c. Non Kayu (ton)	-	-	-	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	11,336	880	1,200	1,500	n/a	183	14.19	19.35	24.19	n/a

Potensi dan permasalahan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya adalah:

Potensi:

1. Struktur organisasi dan payung hukum yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BLHRD maupun Dishut ESDM.
2. Terdapat potensi sumberdaya hutan, baik berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat dikembangkan.

Permasalahan:

1. Terbatasnya SDM
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
3. Kurangnya PPNS dan PPLHD
4. Kurangnya peran dari instansi teknis dan masyarakat dalam pencapaian IKLH.
5. Menurunnya IKLH.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan (SIL).
7. Pengelolaan hutan di tingkat tapak sebagian masih berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
8. Masih tingginya potensi gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
9. Masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan yang belum tertangani.

Selanjutnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan disampaikan pada Tabel T-C.24 berikut:

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya adalah:

Potensi:

1. Alokasi anggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan:

1. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Alokasi anggaran belum disusun secara proporsional berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lima tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, antara lain:

a. Tantangan (*Threats*)

1. Isu global tentang perubahan iklim
2. Masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan
3. Potensi gangguan keamanan kawasan hutan
4. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan lingkungan
5. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan
6. Potensi konflik tenurial dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan

b. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya payung hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Adanya program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sumberdaya hutan dalam Program Pembangunan Daerah yang menjadi acuan program sektoral disetiap SKPD.
3. Kabupaten/Kota memiliki perangkat organisasi sebagai penanggungjawab pengelola lingkungan hidup.
4. Komitmen pemerintah untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 29% pada 2030.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja OPD pada urusan Lingkungan hidup dan Kehutanan pada periode sebelumnya, masih ditemukan adanya gap antara target dan realisasi program dan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pembalakan hutan (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal yang cenderung meningkat menyebabkan terjadinya deforestasi di dalam kawasan dan luar kawasan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) belum berjalan optimal.
3. Belum optimalnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di wilayah Perhutanan Sosial.
4. Belum tercapainya target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan.
5. Belum tertibnya pelaku usaha dalam Penatausahaan Hutan
6. Belum optimalnya pelayanan verifikasi izin terhadap pelaku usaha.
7. Semakin menurunnya luas dan kualitas Danau Limboto.
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Masih lemahnya penegakan hukum perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.

Terjadinya gap antara target dan realisasi di atas disebabkan oleh berbagai permasalahan berikut:

1. Kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan masih terbatas.
2. Sarana prasarana aparatur, baik dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran maupun dukungan kegiatan di lapangan, belum memadai.
3. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Lingkungan hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo untuk Periode Tahun 2017-2022 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”**.

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

Berdasarkan tinjauan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan erat dengan upaya pencapaian Misi Pertama, yaitu **"Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan"**. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan visi dan misi tersebut adalah:

- meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup yang lestari;
- meningkatkan jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan untuk peningkatan produksi dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- meningkatkan kapasitas SDM masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan guna peningkatan indeks kualitas hidup di Provinsi Gorontalo; dan
- meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Adapun faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah:

- masih tingginya praktek hutan dan lahan secara ilegal;
- minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- jumlah anggaran secara keseluruhan belum memadai.

Sementara faktor pendukung pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut adalah:

- jumlah KPH di Provinsi Gorontalo sebanyak 6 (enam) unit;
- adanya dukungan peraturan terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat; dan
- dukungan anggaran khusus untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan cenderung meningkat setiap tahunnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Sasaran strategis pembangunan LHK yang tertuang dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 meliputi: (1) Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan sir dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja IKLH berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap devisa dan PNB; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Upaya pencapaian sasaran strategis pembangunan LHK di atas sejalan dengan 5 dari 8 arah kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo 2017-2022, Kesehatan yang Prima; Ekonomi yang Lebih Meningkat; Pemerintah yang Lebih Melayani; Pariwisata yang Lebih Mendunia; dan Lingkungan yang Lebih Lestari.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD dan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian LHK adalah:

- masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku tindak pidana bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
- sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLHK masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan; dan

- manajemen anggaran yang belum tepat guna dalam rangka peningkatan SDM

Faktor-faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan SKPD yang sejalan dengan upaya pencapaian sasaran strategis pembangunan LHK adalah:

- DLHK Provinsi Gorontalo memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) sebanyak 6 unit yang mengemban 3 fungsi, yaitu fungsi teknis, fungsi manajerial, dan fungsi bisnis;
- DLHK memperoleh anggaran yang cenderung meningkat melalui pendanaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian LHK;
- tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung kinerja masing-masing bidang pada DLHK Provinsi Gorontalo;
- dukungan sektor perbankan terhadap program-program pengendalian pencemaran lingkungan;
- adanya peluang kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan *Non-Government Organization* (NGO) dalam melakukan kajian untuk merumuskan alternatif solusi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip konservasi terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- telah ada pencadangan areal yang ditetapkan untuk kegiatan Perhutanan Sosial

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan melalui tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS melalui mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 terhadap kondisi lingkungan hidup
2. Perumusan alternatif kebijakan, rencana dan program RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Terdapat 10 (sepuluh) program dalam RPJMD yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan rumah sakit.
2. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah dan rawa
3. Pengembangan jalan dan jembatan
4. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
6. Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
7. Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya
8. Pengembangan destinasi pariwisata
9. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
10. Pengembangan kawasan transmigrasi

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian ini bertujuan untuk memitigasi potensi dampak negatif RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, terutama pada kesepuluh program tersebut. Untuk mengintegrasikan hasil KLHS dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Membangun basis data spasial Provinsi Gorontalo, termasuk infrastruktur data geospasial, kelembagaan, legalitas dan SDM secara mandiri agar setiap program dalam RPJMD dapat terinformasikan secara spasial.
- b. Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 serta mengkonsultasikannya dengan para pemangku kepentingan terkait melalui Konsultasi Publik.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD dan pelaksanaan rekomendasi KLHS adalah:

- terjadinya kecenderungan penurunan IKLH di Provinsi Gorontalo;
- penentuan IKLH juga bergantung pada kinerja SKPD lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum; lemahnya kekoordinasi antar SKPD masih menjadi kendala dalam mempertahankan atau meningkatkan nilai IKLH yang terkategori baik.

Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan SKPD dan pelaksanaan KLHS adalah:

- struktur organisasi DLHK yang membawahi 2 bidang urusan, yaitu lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat bersinergi mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan peningkatan IKLH (kualitas air, udara dan tutupan hutan dan lahan);

- alokasi anggaran yang mendukung urusan lingkungan hidup dan kehutanan dinilai cukup dan didistribusikan secara proporsional sesuai kebutuhan program dan kegiatan SKPD.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan OPD, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, Renstra K/L dan KLHS Provinsi Gorontalo, dirumuskan isu-isu strategis dalam bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Perubahan iklim dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca.
Tingkat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan yang masih tinggi ini berkaitan dengan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan tingginya potensi bencana banjir dan tanah longsor; titik api cenderung meningkat; perburuan satwa liar meningkat. Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS belum terlaksana dengan baik; dan tingkat perambahan hutan dan eksploitasi kayu secara ilegal yang masih cenderung meningkat.
2. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup.
Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah diantaranya dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau limboto; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat.
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan.
Isu ini terkait dengan masih rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengolahan lingkungan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan belum optimal. Pada tataran masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan; pendapatan masyarakat sekitar hutan; serta masih terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan pada wilayah Perhutanan Sosial.
4. Tata kelola perencanaan kehutanan yang belum sesuai dengan basis ruang serta perubahan fungsi dan peruntukannya.

Kondisi tata kelola perencanaan kehutanan yang belum sesuai tersebut dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; alih fungsi kawasan hutan masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal; dan menurunnya kepastian kawasan terhadap status, letak serta batas kawasan hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan.

5. Rendahnya pemanfaatan produksi hasil hutan.

Isu ini terkait rendahnya nilai pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang masih rendah antara lain dipengaruhi oleh masih kurangnya diversifikasi usaha produksi hasil hutan; tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, jumlah dan skill tenaga pendamping/penyuluh kehutanan belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan.

Sasaran:

- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari.

2. Meningkatkan Pengendalian dan Penegakan Hukum Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan.

Sasaran:

- Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Tujuan pertama, meningkatkan pengelolaan dan nilai manfaat sumberdaya hutan dan lingkungan, memiliki sasaran berupa terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari mentargetkan luas tutupan hutan yang meningkat setiap tahunnya. Secara nasional dalam tiga dekade terakhir, pola perubahan tutupan hutan di Indonesia sangat terkait dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial dan ekonomi, semakin tinggi laju pertumbuhan sosial ekonomi akan mendorong penurunan tutupan hutan (Dwiprabowo *et al.*, 2014). Data dari Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Tahun 2017 menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan luas tutupan lahan di Provinsi Gorontalo, dari 2009 hingga 2011, terjadi di antaranya pada areal jenis tutupan lahan hutan lahan kering primer (-0,02%), hutan lahan kering sekunder/bekas tebangkan (-0,18%), dan hutan mangrove sekunder (-0,63%). Persentase penurunan

luas tutupan hutan di Provinsi Gorontalo adalah sekitar 13.216 Ha per tahun atau 1,6 persen dari luas total hutan di Provinsi Gorontalo (826.000 Ha).

Berdasarkan kondisi kecenderungan penurunan luasan tutupan hutan tersebut, maka kegiatan pengelolaan dan nilai manfaat sumberdaya hutan dan lingkungan, seperti kegiatan rehabilitasi hutan dan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengimbangi laju degradasi hutan dan lahan dengan cara menekan laju penurunan luas tutupan hutan di Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja DLHK digambarkan melalui kondisi capaian penurunan luas lahan kritis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni sebesar 1.000 Ha per tahun. Dengan demikian, kondisi luas lahan pada awal periode sebesar 705.930 Ha, ditargetkan akan menurun menjadi 700.930 Ha pada tahun 2022.

Tujuan kedua, yaitu meningkatkan pengendalian dan penegakan hukum, pencemaran, kerusakan lingkungan dan kehutanan, memiliki sasaran meningkatnya pengendalian kualitas air dan udara. Target yang ingin dicapai digambarkan melalui indikator sasaran berupa indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan cenderung untuk dapat ditingkatkan melalui berbagai intervensi kebijakan, program dan kegiatan terkait penegakan hukum kerusakan lingkungan dan kehutanan serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara untuk tujuan ketiga dan keempat memiliki sasaran yang jelas ditujukan untuk meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Pencapaian target digambarkan masing-masing melalui persentase peningkatan kualitas pelayanan dan jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN	SASARAN	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari	Persentase Peningkatan Cakupan Tutupan Hutan	Indeks tutupan lahan/hutan	75,65	75,73	75,81	75,88	75,98
2	Meningkatkan Pengendalian dan penegakan hukum Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan kehutanan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.19	72.19	73.03	73.39	73.61
3	Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Layanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Persentase peningkatan kualitas pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kualitas Laporan Perencanaan, Kinerja dan Keuangan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.25.

**TABEL TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
I	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan	Persentase Peningkatan Cakupan Tutupan Hutan	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari	Indeks tutupan lahan/hutan	I Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	
					1 Hutan Manunggal	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	
					2 Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	
					3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas	Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	
					4 Kelola Kawasan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	diganti nomenklatur kegiatan menjadi Keg. "Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial"
					5 Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	
					6 Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	jumlah penurunan titik api karhutla	diganti nomenklatur kegiatan menjadi Keg. "Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan"
					7 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	jumlah penurunan titik api karhutla	
					8 Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan yang dilaksanakan	
					9 Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial - KEE)	Jumlah wilayah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang terbentuk	diganti dengan Keg. "Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)"
					10 Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	
					11 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH I DAN II - GORONTALO BARAT	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato"
					12 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato	Luas lahan yang direhabilitasi	
					13 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH III -POHUWATO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa"
					14 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa	Luas lahan yang direhabilitasi	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					15 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH IV - GORONTALO UTARA	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumalata"
					16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumalata	Luas lahan yang direhabilitasi	
					17 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH V - BOALEMO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tilamuta"
					18 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tilamuta	Luas lahan yang direhabilitasi	
					19 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VI - GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto"
					20 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto	Luas lahan yang direhabilitasi	
					21 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bolango-Bone"
					22 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bolango-Bone	Luas lahan yang direhabilitasi	
					II Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi	
					1 Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	
					2 Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan pengawasan pemegang IPPKH dan fasilitasi permohonan desa/masyarakat terkait dengan PIPPIB dan atau IPPKH	
						Jumlah desa yang dibantu dalam pemenuhan kewajiban IPPKH	
					3 Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHK / IPHHBK / IUIPHHK / Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan)	Jumlah dokumen Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan	
						Jumlah Lokasi Verifikasi Izin pemanfaatan Hutan	
					4 Pengembangan HHBK pada KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat"

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat	
					6 Pengembangan HHBK pada KPH III Pohuwato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohuwato	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohuwato"
					7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohuwato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohuwato	
					8 Pengembangan HHBK pada KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara"
					9 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara	
					10 Pengembangan HHBK pada KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo"
					11 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo	
					12 Pengembangan HHBK pada KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VI - Gorontalo	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo"
					13 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VI - Gorontalo	
					14 Pengembangan HHBK pada KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VII - Bone Bolango dan Kota	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH KPH VII Bone Bolango dan Kota "
					15 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH VII - Bone Bolango dan Kota	
					III Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK FISIK)	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					1 Hutan Manunggal (DAK FISIK)	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	
					2 Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	
					3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK FISIK)	Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	
					4 Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan (DAK FISIK)	Jumlah Fasilitas Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang dibangun	
					5 Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (DAK FISIK)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang terfasilitasi dalam pengelolaan kawasan	
					6 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
					7 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit III Pohuwato (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
					8 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
					9 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit V Boalemo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
					10 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
					11 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI I Bone Bolango dan Kota Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi	
II	Meningkatkan Pengendalian dan penegakan hukum Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan kehutanan	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IV Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air dan Udara	
					1 Pemantauan Kualitas lingkungan (air & udara)	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai Jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien	
					2 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan (Ijin lingkungan, PPA, PPU)	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ijin lingkungan, PPA, PPU"

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					3 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ijin lingkungan, PPA, PPU	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	
					4 Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi proses AMDAL, UKL-UPL & SPPL	Prosentase peningkatan kinerja Pelaksanaan administrasi proses amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) kab/kota	
					5 Penyusunan dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Gorontalo	Jumlah dokumen yang tersusun	
					6 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Kinerja pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan	
					7 Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R	jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	
					8 Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen DDLHDT yang tersusun	
					9 Pengadaan laboratorium lingkungan provinsi	Jumlah fasilitas pengujian kualitas air, udara & tanah rujukan provinsi	
					10 Pengumpulan dan Penyusunan Data DIKPLHD, IKLH	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)"
					11 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup	
					12 Penyusunan Valuasi ekonomi pencemaran LH dan kerusakan SDA Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan valuasi ekonomi pencemaran LH dan kerusakan SDA	
					13 Penyusunan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perda RPPLH yang tersusun	
					V Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DAK Fisik)	Indeks Kualitas Air dan Udara	
					1 Pemantauan Kualitas Air Secara Online (DAK Fisik)	Jumlah fasilitas pemantauan kualitas air secara online yang tersedia	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					VI Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Persentase SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	
					1 Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Provinsi Konservasi	Jumlah kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan kapasitasnya	
					2 Pembinaan / Penilaian Adipura & Sekolah Adiwiyata	Jumlah lokasi penilaian Adipura Jumlah sekolah Adiwiyata	
					3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Penanaman Mangrove)	jumlah lokasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kegiatan Penanaman Mangrove	
					VII Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	Persentase Kasus LHK yang Diselesaikan	
					1 Operasi Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"
					2 Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	
					3 Operasi Justice tindak pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyelesaian Tindak Pidana LHK"
					4 Penyelesaian Tindak Pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK	
III	Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Persentase Layanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan	VIII Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	
					1 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					2 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					3 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	
					4 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	Jumlah jasa kantor yang tersedia	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	KETERANGAN
					5 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					6 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					7 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					8 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					9 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					10 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					11 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					12 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					13 Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
					14 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	
					15 peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	
IV	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	Persentase kualitas Laporan Perencanaan, Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	IX Program Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	
					1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	
					2 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai SAP	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD, seperti pada tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera			
MISI : Mewujudkan Pengelolaan Pariwisata dan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari	Melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati.	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan dan perlindungan hutan dan lingkungan yang mendukung konservasi sumberdaya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
		Peningkatan nilai produktivitas/manfaat sumberdaya hutan	
		Luas lahan yang telah dikelola melalui skema pemberdayaan masyarakat.	
Meningkatkan Pengendalian dan penegakan hukum Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan kehutanan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan	
		Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan dan lingkungan	
		Penegakan hukum secara komprehensif dan berkesinambungan.	
Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Optimalisasi SDM dalam pengelolaan lingkungan.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
		Peningkatan kuantitas dan kualitas PPNS dan Pejabat Pengawas LH Daerah.	
		Peningkatan sarana dan prasarana melalui anggaran yang memadai.	
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam program dan kegiatan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan pada Tabel T-C.27 berikut:

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari			Persentase Peningkatan Cakupan Tutupan Hutan	Nilai Tutupan Hutan 67,50	1%		1%		1%		1%		1%		5%		DLHK			
				Indeks tutupan lahan/hutan	67,50	75,65	7,204,947,977	75,73	5,786,000,000	75,81	5,555,507,126	75,88	6,502,432,134	75,98	7,534,353,325	76%					
			1	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	39,000 Ha	1000 Ha	5,355,689,272	1000 Ha	4,355,000,000	1000 Ha	4,008,000,000	1000 Ha	5,001,977,329	1000 Ha	5,880,266,673	44,000 Ha	24,600,933,274			
			1	Hutan Manunggal	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	270 Ha	100 Ha	500,000,000	100 Ha	650,000,000	55 Ha	425,000,000	55 Ha	500,000,000	65 Ha	650,000,000	590 Ha	2,725,000,000		Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	
			2	Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	0	60 Ha	300,000,000	60 Ha	390,000,000	55 Ha	475,000,000	55 Ha	600,000,000	60 Ha	700,000,000	245 Ha	2,465,000,000		Desa Bakti Kec. Pulubela Kab. Gilo, Desa Talumello Kec. Telaga Kab. Gilo	
			3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas	Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	20,000 Ha	400 Ha	2,000,000,000	400 Ha	2,600,000,000	400 Ha	1,508,000,000	500 Ha	2,000,000,000	550 Ha	2,300,000,000	21.850 Ha	10,408,000,000		Desa Puncak Kec. Pulubela Kab. Gorontalo	
			4	Kadala Kawasan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	981,51 Ha	200 Ha	680,000,000	diganti nomenklatur kegiatan menjadi Keg. "Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial"											Kab Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut	
			5	Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola	981,51 Ha			200 Ha	850,000,000	200 Ha	850,000,000	200 Ha	1,000,000,000	200 Ha	1,200,000,000	1,782 Ha	4,580,000,000		Kab Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut	
			6	Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	Jumlah penurunan titik api karhutla	64	10 Titik Hot Spot	180,000,000	diganti nomenklatur kegiatan menjadi Keg. "Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan"											5 Kab/kota (Kab Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut)	
			7	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah penurunan titik api karhutla	64			10 Titik Hot Spot	190,000,000	10 Titik Hot Spot	200,000,000	10 Titik Hot Spot	275,000,000	10 Titik Hot Spot	325,000,000	114 Titik Hot Spot	1,170,000,000		5 Kab/kota (Kab Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut)	
			8	Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan yang dilaksanakan		24 kali	320,689,272	24 kali	350,000,000	24 kali	350,000,000	24 kali	376,977,329	24 kali	405,266,673	120 Kali	1,802,933,274		5 Kab/kota (Kab Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut)	
			9	Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan Undung Berbasis Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial - KEE)	Jumlah wilayah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang terbentuk	0	1 Laporan	165,000,000	diganti dengan Keg. "Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)"											Tonsiaje Kabupaten Pohuwato	
			10	Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	0	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	300,000,000	5 Laporan	1,090,000,000			Tonsiaje Kabupaten Pohuwato		
			11	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH I DAN II - GORONTALO BARAT	Luas lahan yang direhabilitasi		50 Ha	250,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato"											Gorontalo Barat	
			12	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan Popayato	Luas lahan yang direhabilitasi		50 Ha	325,000,000	50 Ha	301,000,000	65 Ha	320,000,000	65 Ha	380,000,000	230 Ha	1,326,000,000			Gorontalo Barat		
			13	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH III - POHUWATO	Luas lahan yang direhabilitasi		45 Ha	225,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa"											Pohuwato	
			14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Randangan dan Marisa	Luas lahan yang direhabilitasi		45 Ha	292,500,000	45 Ha	316,000,000	65 Ha	320,000,000	65 Ha	380,000,000	220 Ha	1,308,500,000			Pohuwato		
			15	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH IV - GORONTALO UTARA	Luas lahan yang direhabilitasi		45 Ha	225,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumata"											Gorontalo Utara	
			16	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Sumata	Luas lahan yang direhabilitasi		45 Ha	292,500,000	45 Ha	250,000,000	65 Ha	320,000,000	65 Ha	380,000,000	220 Ha	1,242,500,000			Gorontalo Utara		
			17	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH V - BOALEMO	Luas lahan yang direhabilitasi		30 Ha	150,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tamuta"											Boalemo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			18 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Tiamuta	Luas lahan yang direhabilitasi			30 Ha	195,000,000	30 Ha	250,000,000	35 Ha	320,000,000	35 Ha	380,000,000	130 Ha	1,145,000,000		Boalemo	
			19 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VI - GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi		50 Ha	250,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto"											Kabupaten Gorontalo
			20 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Limboto	Luas lahan yang direhabilitasi			50 Ha	325,000,000	50 Ha	250,000,000	65 Ha	320,000,000	65 Ha	380,000,000	230 Ha	1,275,000,000		Kabupaten Gorontalo	
			21 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di KPH VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Luas lahan yang direhabilitasi		20 Ha	110,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bolango-Bone"											Bone Bolango dan Kota
			22 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Bolango-Bone	Luas lahan yang direhabilitasi			20 Ha	143,000,000	20 Ha	250,000,000	50 Ha	320,000,000	50 Ha	380,000,000	140 Ha	1,093,000,000		Bone Bolango dan Kota	
		2	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi	102 Pelaku Usaha	107	1,849,258,705	115	1,431,000,000	117	1,547,507,126	120	1,500,454,805	120	1,654,086,652	120 Pelaku Usaha	1,654,086,652		Provinsi Gorontalo
			1 Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan		56 Laporan (IUI : 22 + IPK : 4 + TPT-KO : 27 + TP-HBK : 3 Pelaku Usaha	198,405,695	56 Laporan	231,000,000	56 Laporan	237,507,126	56 Laporan	275,454,805	56 Laporan	304,086,652	280 laporan	1,246,454,278		
			2 Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan pengawasan pemegang IPPKH dan fasilitasi permohonan desa/masyarakat terkait dengan PIPPIB dan atau IPPKH		11 IPPKH + 1 IPPKH baru	265,000,000	11 IPPKH + 1 IPPKH baru	300,000,000	11 IPPKH + 2 IPPKH baru	310,000,000	11 IPPKH	320,000,000	11 IPPKH + 1 IPPKH baru	350,000,000	55 IPPKH + 6 IPPKH baru	1,545,000,000		
				Jumlah desa yang dibantu dalam pemenuhan kewajiban IPPKH				3 Desa	450,000,000	3 Desa	500,000,000	3 Desa	600,000,000	3 Desa	650,000,000	12 Desa	2,200,000,000		Provinsi Gorontalo
			3 Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPH-K / IPH-HBK / IUIP-HK / Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan)	Jumlah dokumen Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan		IPH-HBK : 37 + IPJL 1	265,000,000	IPH-HBK 37	450,000,000	IPH-HBK 38	500,000,000	IPH-HBK 40	305,000,000	IPH-HBK 40	350,000,000	IPPHBK : 192 + IPJL 1	1,870,000,000		
				Jumlah Lokasi Verifikasi Izin pemanfaatan Hutan				2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		8 Lokasi			
			4 Pengembangan HHBK pada KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat		1 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat"											Gorontalo Barat
			5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH I dan II Gorontalo Barat	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH I dan II Gorontalo Barat				1 komoditas	229,000,000	2 komoditas	241,646,791	2 komoditas	319,099,343	2 komoditas	370,304,538	7 Komoditas	1,160,050,672		Gorontalo Barat
			6 Pengembangan HHBK pada KPH III Pohuwato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohuwato		2 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohuwato"											Pohuwato
			7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH III Pohuwato	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH III - Pohuwato				2 komoditas	240,000,000	2 komoditas	241,646,791	2 komoditas	319,099,343	2 komoditas	370,304,538	8 Komoditas	1,171,050,672		Pohuwato
			8 Pengembangan HHBK pada KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara		2 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara"											Gorontalo Utara
			9 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH IV Gorontalo Utara	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH IV - Gorontalo Utara				2 komoditas	229,000,000	2 komoditas	241,646,791	2 komoditas	319,099,343	2 komoditas	370,304,538	8 Komoditas	1,160,050,672		Gorontalo Utara
			10 Pengembangan HHBK pada KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo		3 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo"											Boalemo
			11 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH V Boalemo	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH V - Boalemo				3 komoditas	229,000,000	2 komoditas	241,646,791	3 komoditas	319,099,343	3 komoditas	370,304,538	11 Komoditas	1,160,050,672		Boalemo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			12 Pengembangan HHEBK pada KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHEBK yang dikembangkan pada KPH VI = Gorontalo		3 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo"											Kabupaten Gorontalo
			13 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VI Gorontalo	Jumlah Komoditas HHEBK yang dikembangkan pada KPH VI = Gorontalo				3 komoditas	229,000,000	2 komoditas	241,646,791	2 komoditas	319,099,343	2 komoditas	370,304,538	12 Komoditas	1,160,050,672	Kabupaten Gorontalo	
			14 Pengembangan HHEBK pada KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHEBK yang dikembangkan pada KPH VII = Bone Bolango dan Kota		1 komoditas	186,808,835	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH KPH VII Bone Bolango dan Kota "											Bone Bolango dan Kota
			15 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH VII Bone Bolango dan Kota	Jumlah Komoditas HHEBK yang dikembangkan pada KPH VII = Bone Bolango dan Kota				1 komoditas	229,000,000	2 komoditas	241,646,791	2 komoditas	319,099,343	2 komoditas	370,304,538	7 Komoditas	1,160,050,672	Bone Bolango dan Kota	
		3	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK FISIK)	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	39,000 Ha	1000 Ha	29,649,317,630	1000 Ha	16,898,641,576	1000 Ha	36,129,204,602	1000 Ha	33,049,263,616	1000 Ha	35,130,380,023	44,000 Ha	150,856,807,447		
			1 Hutan Manunggal (DAK FISIK)	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	0	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	2500 Ha	10,000,000,000		
			2 Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	0	50 Ha	200,000,000	150 Ha	600,000,000	200 Ha	800,000,000	250 Ha	1,000,000,000	300 Ha	1,200,000,000	300 Ha	3,800,000,000		
			3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK FISIK)	Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	0	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	500 Ha	2,000,000,000	2500 Ha	10,000,000,000		
			4 Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan (DAK FISIK)	Jumlah Fasilitas Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang dibangun		6 unit	1,500,000,000	6 unit	1,500,000,000	6 unit	1,500,000,000	6 unit	1,500,000,000	6 unit	1,500,000,000	30 Kali	7,500,000,000	5 Kab/kota(Kab Gorontalo,Bolalemo,Pohuwato,Bonbol, Gorut)	
			4 Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (DAK FISIK)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang terfasilitasi dalam pengelolaan kawasan		2 KTH	680,000,000	2 KTH	700,400,000	2 KTH	721,412,000	2 KTH	743,054,360	2 KTH	765,345,991	10 KTH	3,610,212,351	Kab Gorontalo, Bolalemo, Pohuwato, Bonbol, Gorut	
			5 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		50 Ha	1,000,000,000	50 Ha	1,000,000,000	50 Ha	1,000,000,000	50 Ha	1,000,000,000	50 Ha	1,000,000,000	250 Ha	5,000,000,000		
			6 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit III Pohuwato (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		85 Ha	1,000,000,000	85 Ha	1,000,000,000	85 Ha	1,000,000,000	85 Ha	1,000,000,000	85 Ha	1,000,000,000	425 Ha	5,000,000,000		
			7 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	500 Ha	5,000,000,000		
			8 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit V Boalemo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	100 Ha	1,000,000,000	500 Ha	5,000,000,000		
			9 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	700 Ha	5,000,000,000		
			10 Peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan di UPTD KPH Unit VI I Bone Bolango dan Kota Gorontalo (DAK FISIK)	Luas lahan yang direhabilitasi		140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	140 Ha	1,000,000,000	700 Ha	5,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Pengendalian dan penegakan hukum Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan kesehatan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		1%		1%		1%		1%		5%					
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,67	72,06	2,159,869,007	72,19	3,078,000,000	73,03	3,668,853,820	73,39	2,510,459,911	73,61	2,881,704,990	73,61			
		4	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air dan Udara	39,4 / 98,83	40,5/98,84	1,473,121,101	40,8/98,85	2,014,000,000	43,5/98,86	2,536,000,000	44,6/98,87	1,619,443,901	45,2/98,88	1,735,982,235	45,2/98,88	1,735,982,235		
		1	Pemantauan Kualitas lingkungan (air & udara)	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	5 sungai	264,702,101	5 sungai	313,000,000	5 sungai	313,000,000	5 sungai	313,000,000	5 sungai	313,000,000	25 Sungai	1,516,702,101	Sungai Bone, Sungai Biyonga,Sungai Paguyaman,Sungai Taluduyunu,Sungai Buladu,(setiap kab 4 titik(kawasan pemukiman,perkantoran,perdagangan/i ndustri,transportasi)		
				Jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien	24 titik sampling		24 titik sampling		24 titik sampling		24 titik sampling		24 titik sampling		120 titik sampling				
		2	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan (Ijin lingkungan, PPA, PPU)	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	21 usaha/ kegiatan	191,250,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ijin lingkungan, PPA, PPU"												
		3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ijin lingkungan, PPA, PPU	Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			23 kegiatan/ usaha	371,000,000	25 kegiatan/ usaha	371,000,000	27 kegiatan/ usaha	230,000,000	29 kegiatan/ usaha	250,000,000	29 kegiatan/usaha	1,413,250,000	RSUD Ainun,PT Gorontalo Citra Lestari,PT Gema Nusantara Jaya,PT,Gorontalo Sejahtera Mining,PT Pertamina Persero(Terminal bhm gorontalo),PT PLN Persero(PLTD Toboga), PT PLN Persero(PLTD unit makko paguat),PTPG Gorontalo,PT HARIM Paguat,PT Tenaga Listrik Gorontalo,PT Trijaya Tangguh 1,PT Trijaya Tangguh II, PT Hubs Nabati Sukawesi,PT.Banyantumbu Lestari,PT Inti Global Lakana,PT Loka Indah Lestari, PT Sawit Tiana Nusa,PT Karunia Sawit Permai,Pelabuhan Angrek, Pelabuhan Tilameta,PT Gorontalo Listrik Persada(talameta),PT Arizindo,PT Lion Global Energi,PT Mitra citra permata,PT Agro,PT Tri Putra,PT. Agro Arta Surya		
		4	Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi proses AMDAL, UKL-UPL & SPPL	Prosentase peningkatan kinerja Pelaksanaan administrasi proses amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) kab/kota	30%	150,070,000	30%	178,000,000	50%	180,000,000	60%	200,000,000	70%	225,000,000	70 %	933,070,000			
				Jumlah KPA kab/kota yang terlisensi	3 KPA		3 KPA		4 KPA		5 KPA		6 KPA		6 KPA				
		5	Penyusunan dokumen KLHS R2WP3K Provinsi Gorontalo	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	80,614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	80,614,000			
		6	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Kinerja pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan	30%	97,000,000	40%	121,000,000	50%	125,000,000	60%	135,000,000	75%	145,000,000	75%	623,000,000	Semua Rumah Sakit(RSUD Ainun Habibie, RSUD Aloe Saboe, RSUD Dunda, Rumah sakit umum dan swasta, RS Tari & Nelayan, RSUD Marisa, RS Bunda, RS Mulazam, RS Siti Khadijah		
		7	Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R	Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	129,010,000	300 orang	250,000,000	300 orang	250,000,000	200 orang	161,556,099	200 orang	187,982,235	1,200 Orang	978,548,334	Kabupaten Gorontalo		
		8	Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen DDUHDT yang tersusun	1 dokumen	225,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	225,475,000			
		9	Pengadaan laboratorium lingkungan provinsi	Jumlah fasilitas pengujian kualitas air, udara & tanah rujukan provinsi	-	-	-	-	1 unit	750,000,000	-	-	-	-	1 unit	750,000,000			
		10	Pengumpulan dan Penyusunan Data DIKPLHD, IKLH	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup	2 Laporan	175,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)"												
		11	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup			2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	322,887,802	2 Dokumen	350,000,000	8 Dokumen	1,272,887,802			
		12	Penyusunan Valuasi ekonomi pencemaran LH dan kerusakan SDA Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan valuasi ekonomi pencemaran LH dan kerusakan SDA	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	241,000,000	1 Laporan	247,000,000	1 Laporan	257,000,000	1 Laporan	265,000,000	5 Laporan	1,170,000,000			
		13	Penyusunan Perda Rencana Perindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perda RPPLH yang tersusun	-	-	1 Dokumen	240,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	240,000,000	Provinsi Gorontalo		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DAK Fisik)	Indeks Kualitas Air dan Udara	39,4 / 98,83	40,5/98,84	2,423,495,812	40,8/98,85	2,182,000,000	43,5/98,86	3,315,707,640	44,6/98,87	2,832,032,020	45,2/98,88	3,341,445,510	45,2/98,88	3,341,445,510		
		1	Pemantauan Kualitas Air Secara Online (DAK Fisik)	Jumlah fasilitas pemantauan kualitas air secara online yang tersedia	-	1 unit	1,050,000,000	1 unit	1,050,000,000	1 unit	1,050,000,000	1 unit	1,050,000,000	1 unit	1,050,000,000	5 unit	5,250,000,000		
		6	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Persentase SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	40,92	17,63	580,000,000	21,91	928,000,000	20,15	928,000,000	21,41	490,212,280	18,89	545,000,000	18,89	545,000,000		Provinsi Gorontalo
		1	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Provinsi Konservasi	Jumlah kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan kapasitasnya		1 Sungai (Sungai Randamngan)	175,000,000									1 Sungai (Sungai Randamngan)	175,000,000		5 Sungai
				Jumlah kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan kapasitasnya				7 Kelompok	603,000,000	7 Kelompok	603,000,000	7 Kelompok	250,000,000	7 Kelompok	275,000,000	28 Kelompok	1,731,000,000		
		2	Pembinaan / Penilaian Adipura & Sekolah Adiwiyata	Jumlah lokasi penilaian Adipura & sekolah Adiwiyata		6 Kabupaten/Kota	200,000,000									6 Kabupaten/Kota	200,000,000		6 Kabupaten/Kota
				Jumlah lokasi penilaian Adipura				6 Kab/Kota	325,000,000	6 Kab/Kota	325,000,000	6 Kab/Kota	240,212,280	6 Kab/Kota	270,000,000	6 Kab/Kota	1,160,212,280		
				Jumlah sekolah Adiwiyata				25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah			
		3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Penanaman Mangrove)	Jumlah lokasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kegiatan Penanaman Mangrove		2 Kabupaten	205,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kabupaten	205,000,000		2 Kabupaten
		7	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	Persentase Kasus LHK yang Diselesaikan	10,39	14,49	106,747,906	28,99	136,000,000	43,48	204,853,820	57,97	400,803,730	72,46	600,722,755	72,46	600,722,755		Provinsi Gorontalo
		1	Operasi Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan		5 Kasus	53,747,906	diganti dengan nomenklatur Keg. "Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"											
		2	Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan				2 Laporan	68,000,000	2 Laporan	102,426,910	2 Laporan	200,401,865	2 Laporan	300,361,755	8 Laporan	671,190,530		Provinsi Gorontalo
		3	Operasi Justice tindak pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK		5 Kasus	53,000,000	diganti dengan nomenklatur Keg. "Penyelesaian Tindak Pidana LHK"											
		4	Penyelesaian Tindak Pidana LHK	Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK				2 Laporan	68,000,000	2 Laporan	102,426,910	2 Laporan	200,401,865	2 Laporan	300,361,000	8 Laporan	671,189,775		Provinsi Gorontalo
				Persentase Layanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM yang berkompeten															
				Persentase peningkatan kualitas pelayanan	100%	100%	2,675,445,552	100%	3,018,520,788	100%	2,830,933,566	100%	3,081,315,506	100%	3,171,248,975	100%	14,777,464,387		
		8	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	2,675,445,552	100%	3,018,520,788	100%	2,830,933,566	100%	3,081,315,506	100%	3,171,248,975	100%	14,777,464,387		Provinsi Gorontalo
		1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	6 Jasa Kantor	724,234,398	6 Jasa Kantor	750,290,788	6 Jasa Kantor	760,270,390	6 Jasa Kantor	775,345,766	6 Jasa Kantor	784,608,737	30 Jasa Kantor	3,794,750,079		Provinsi Gorontalo
		2	Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	7 Unit	840,480,000	7 Unit	850,000,000	7 Unit	857,000,000	7 Unit	954,000,000	7 Unit	975,000,000	21 Unit	4,476,480,000		Provinsi Gorontalo
		3	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	100%	10 Orang	150,000,000	10 Orang	150,000,000	10 Orang	150,000,000	10 Orang	150,000,000	10 Orang	150,000,000	50 Orang	750,000,000		Provinsi Gorontalo
		4	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	83,000,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	459,836,573		UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
			5 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	83,000,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	454,164,145	UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat			
			6 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	147,430,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	524,266,573	UPTD KPH Unit III Pohuwato			
			7 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	290,800,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	661,964,145	UPTD KPH Unit III Pohuwato			
			8 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	83,000,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	459,836,573	UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara			
			9 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	83,000,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	454,164,145	UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara			
			10 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	83,000,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	459,836,573	UPTD KPH Unit V Boalemo			
			11 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	83,000,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	454,164,145	UPTD KPH Unit V Boalemo			
			12 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	83,000,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	459,836,573	UPTD KPH Unit VI Gorontalo			
			13 Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	83,000,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	454,164,145	UPTD KPH Unit VI Gorontalo			
			14 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Jumlah jasa kantor yang tersedia	100%	2 Jasa Kantor	80,121,859	2 Jasa Kantor	83,000,000	2 Jasa Kantor	91,277,196	2 Jasa Kantor	100,164,145	2 Jasa Kantor	105,273,373	10 Jasa Kantor	459,836,573	UPTD KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota			
			15 peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	100%	4 Unit	80,000,000	4 Unit	83,000,000	4 Unit	86,000,000	4 Unit	100,164,145	4 Unit	105,000,000	20 Unit	454,164,145	UPTD KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota			
			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan			Persentase kualitas Laporan Perencanaan, Kinerja dan Keuangan														
							Persentase keselarasan dokumen perencanaan		100%	960,731,151	100%	970,000,000	100%	989,053,048	100%	1,087,629,268	100%	1,118,564,567	100%	5,125,978,034	
						9 Program Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	960,731,151	100%	970,000,000	100%	989,053,048	100%	1,087,629,268	100%	1,118,564,567	100%	5,125,978,034	Provinsi Gorontalo
						1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	6 Laporan	6 Laporan	810,731,151	6 Laporan	820,000,000	6 Laporan	839,053,048	6 Laporan	937,629,268	6 Laporan	968,564,567	30 Laporan	4,375,978,034	Provinsi Gorontalo
2 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai SAP	1 Laporan				1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	5 Laporan	750,000,000	Provinsi Gorontalo			
						Jumlah Tahun 1 =	13,000,993,687	Tahun 2 =	12,852,520,788	Tahun 3 =	13,044,347,560	Tahun 4 =	13,181,836,819	Tahun 5 =	14,705,871,857	49,040,167,337					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo memiliki kaitan erat dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Proses penyusunan Renstra DLHK Provinsi Gorontalo mengacu pada Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator kinerja dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan gambaran hasil kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selama 5 tahun mendatang sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo digambarkan melalui kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian per tahun selama 5 tahun ke depan. Secara rinci, indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD ini disajikan dalam Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<i>(1)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,7	72,06	72,19	73,03	73,39	73,61	73,61
2	Luas Lahan Kritis	705.930 Ha	1000 Ha	1000 Ha	1000 Ha	1000 Ha	1000 Ha	700.930 Ha

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra DLHK ini menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD pada tahun pertama. Dokumen ini sekaligus merupakan pedoman yang menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja SKPD setelah Renstra periode sebelumnya berakhir. Renja-SKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra-SKPD pada periode berikutnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Provinsi Gorontalo 2017-2022.

Gorontalo, Januari 2019
Kepala Dinas



BAMBANG TRIHANDOKO, SP
NIP 197508231999031004